

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER  
YANG MENGHILANGKAN SENJATA API  
(Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)  
Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

**Puji Erwanto**  
NPM : 0871010061

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Erwanto  
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 07 April 1989  
NPM : 0871010061  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Menanggal V Gg . Kenari 53-B

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan ( plagiat ).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan ( Sarjana Hukum ) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
Pembimbing Utama

Surabaya, 15 Juni 2012  
Penulis

( Subani SH, Msi )  
NIP : 19510504 198303 1 001

Puji Erwanto  
NPM : 0871010061

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MENGHILANGKAN SENJATA API  
(Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)  
Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010

Disusun Oleh :

Puji Erwanto  
0871010061

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Subani, SH., M.Si.  
NIP : 19510504 198303 1 001

Mengetahui  
DEKAN

Hariyo Sulistyantoro, SH, MM.  
NIP : 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MENGHILANGKAN SENJATA API

(Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)  
Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010

Oleh :

Puji Erwanto  
0871010061

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 15 Juni 2012  
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.si.  
NIP : 19510504 198303 1 001

SUTRISNO, SH. M. Hum  
NIP : 19601212 98808 1 001

2.

HARIYO SULISTYANTORO, SH, MM  
NIP : 19620625 199103 1 001

3.

Subani, SH., M.si.  
NIP : 19510504 198303 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

HARIYO SULISTYANTORO, SH, MM  
NIP : 19620625 199103 1 001

HALAMAN REVISI DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MENGHILANGKAN SENJATA API  
(Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)  
Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010

Oleh :

Puji Erwanto  
0871010061

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 21 Juni 2012  
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, SH.,M.si.  
NIP : 19510504 198303 1 001

SUTRISNO,SH.M.Hum  
NIP :19601212 98808 1 001

2.

HARIYO SULISTYANTORO,SH, MM  
NIP :19620625 199103 1 001

3.

Subani, SH.,M.si.  
NIP : 19510504 198303 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

HARIYO SULISTYANTORO,SH, MM  
NIP :19620625 199103 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran TUHAN Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :Pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang meghilangkan senjata api (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010 )

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur .Serta penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H.,M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec.Gendut Sukarno, MS selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.

4. Letkol CHK Hariyadi Eko Purnomo, SH selaku kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Letkol CHK A.Jailanie, SH selaku Panitera di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
6. Bapak Subani, SH.,M.Si selaku Kaprogdi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dengan meluangkan waktunya
7. Bapak Fauzul Aliwarman, SHi.,M.Hum selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Letda CHK Iskandar, SH selaku Pembimbing magang selama penulis melakukan magang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur..
10. Seluruh staf kepegawaian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah membantu memberikan saran dan masukan maupun memberikan support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua Sugiyarto dan Sopiah, serta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil untuk selesainya skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 15 Juni 2012

Penulis



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Puji Erwanto  
NPM : 0871010061  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 07 April 1990  
Program Studi : Strata 1 ( S1)  
Judul Skripsi :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER  
YANG MENGHILANGKAN SENJATA API

(Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana akibat hukum bagi anggota militer yang menghilangkan senjata api dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang menghilangkan senjata api. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap anggota militer yang menghilangkan senjata api berbeda hukuman apa bila hilang pada saat lepas dinas dan pada saat dinas. Anggota militer yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum maupun pelanggaran ketentuan dari KUHPM tidak selalu mendapatkan hukuman pemecatan, tergantung dari beratnya pelanggaran yang dilakukan. Anggota militer dikenakan dua hukuman yaitu pertama hukuman disiplin militer misalnya seperti penundaaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan dan yang kedua hukuman pidana militer misalnya seperti hukuman penjara.

Kata kunci : Menghilangkan senjata api, Pertanggung jawaban pidana militer

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	6
1.5.2 Pengertian Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api.....	23
1.6 Metode Penelitian .....	29
1.6.1 Jenis Penelitian.....	29
1.6.2 Sumber Data .....	30
1.6.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	30
1.6.4 Metode Analisis Data.....	31
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	32
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	32

1.6.7 Waktu Penelitian.....	33
<b>BAB II.FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANGGOTA MILITER MENGHILANGKAN SENJATA API.....</b>	<b>35</b>
2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan anggota militer menghilangkan senjata api..	35
<b>BAB III. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API .....</b>	<b>40</b>
3.1 Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api.....	40
3.2 Perbuatan Menghilangkan Atau Merusak Senjata Dalam Perang Maupun Di Luar Perang.....	43
3.3 Dasar Hukum Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Yang Merupakan Peralatan Dalam Berperang .....	45
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Wawancara

Lampiran 3 : Putusan

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Adalah suatu kenyataan bahwa sampai dewasa ini sangat kurangnya tulisan-tulisan tentang hukum militer di Negara Republik Indonesia, keadaan ini harus kita terima sebagai tantangan untuk memberikan sumbangan pemikiran dari hasil usaha penggalian hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup atau pernah hidup dalam masyarakat keprajuritan, terutama dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Sumbangan-sumbangan fikiran bagaimanapun kecilnya tentu sangat dibutuhkan dalam rangka pembuatan undang-undang tentang hukum pidana militer khususnya yang bersifat nasional.

Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.

Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar, misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik, tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat

perhatian, padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi.

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata.

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara<sup>1</sup>. Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.

Maka, Peradilan Militer merupakan salah satu (subsistem) dari Peradilan Negara (sistem Peradilan Indonesia) yang ditentukan oleh Undang-undang dan mempunyai kedudukan yang sederajat dan setingkat dengan lingkungan Peradilan lainnya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-PTM Jakarta, 1981, hal 26

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Iskandar di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (TNI) merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Setiap Negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan professional untuk melindungi keutuhan wilayah, menegakan kedaulatan, melindungi warga negaranya dan menjadi perekat persatuan bangsa.

Dengan bergantinya kekuasaan Pemerintah Orde Baru, rakyat menghendaki perubahan yaitu memisahkan anggota Polri dari ABRI dan Peradilan Militer. Kedudukan TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yaitu TNI sebagai alat negara bertugas dibidang pertahanan Negara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), dan Polri sebagai alat Negara yang tugasnya lebih berorientasi kepada penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Polri yang melakukan tindak pidana tidak lagi diadili di Peradilan Militer, tetapi Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Tap MPR No.VII/MPR/2000, yaitu bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dan TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 8 Januari 2002, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a,

anggota Polri bukan lagi Prajurit TNI tetapi sebagai Pegawai Negeri sehingga pelanggaran tindak pidana yang dilakukan anggota Polri menjadi yuridiksi Peradilan Umum (Pasal 29 ayat 1 UU No.2/2002). Tindak pidana yang dilakukan anggota Polri setelah 8 Januari 2002 sudah tidak diadili lagi oleh Peradilan Militer di seluruh Indonesia, karena Oditur Militer tidak menyerahkan/melanjutkan perkara ke Pengadilan Militer, tetapi menegembalikan berkas perkara ke penyidik Polisi Militer untuk selanjutnya dikembalikan ke Provos Polri<sup>3</sup>.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Iskandar ,di Pengadilan Militer III-12 Surabaya



bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagaiberikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota militer kehilangan senjata api.
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang menghilangkan senjata api.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan anggota militer kehilangan senjata api.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang menghilangkan senjata api.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang pertanggung jawaban pidana kepada anggota militer yang menghilangkan senjata api.
- b. Dengan mengetahui adanya pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang menghilangkan senjata api maka diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama oleh militer dan dapat

meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama oleh militer dan dapat meningkatkan penegakan kedisiplinan militer, sehingga dapat memperbaiki nama baik kemiliteran baik di dalam kesatuan maupun diluar kesatuan yang akhirnya juga memperbaiki nama bangsa.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai refrensi kepada peneliti lainnya yang berminat pada penelitian yang sama.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering di pakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit<sup>4</sup>. Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “strafbaar feit” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang ( yang mampu bertanggung jawab)

---

<sup>4</sup> Moeljatno, asas-asas hukum pidana, Rineka cipta, Jakarta 1993, hal 55

Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar<sup>5</sup>.

#### 1.5.1.2 Macam-macam Tindak Pidana

##### a) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria, pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke-II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam buku ke-III.

#### 1. Tindak Pidana Kejahatan :

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya:

---

<sup>5</sup> Ibid 56-57

- Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukkan terhadap kelakuan orang.
- Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.
- Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau rumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan pihak-pihak yang membuat perumusan.

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Di sini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tau apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. dilihat dari segi sosiologis kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat yang disebabkan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.

Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat, yaitu orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

b) Tindak Pidana Khusus / Militer

tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, terdiri dari :

1. Tindak pidana militer murni ( *Zuiver Militaire Delict* ) :

tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

2. Tindak Pidana Militer Campuran ( *Germengde Militaire Delict* ) : tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.<sup>6</sup>

1.5.1.3 Jenis Tindak Pidana

Secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Sekalipun dalam KUHP yang berlaku tidak ada satu pasal pun yang menyatakan adanya pembagian tersebut, namun adalah merupakan kenyataan , bahwa dalam KUHP yang kini berlaku tindak pidana

---

<sup>6</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1981, hal 16-17

dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian atas dua jenis tindak pidana tersebut didasarkan perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, namun telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Pada umumnya rumusan-rumusan tindak pidana didalam KUHP merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooiddelict* yaitu tindak pidana yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Menurut P.A.F.Laminating, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>8</sup>

## 3. Tindak Pidana Commisionis, Tindak Pidana Ommisionis, dan Tindak Pidana Commisionis per ommisionis commissa

Tindak pidana commisionis yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.

---

<sup>7</sup>Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hal 27

<sup>8</sup>Ibid, hal 28

Sedangkan tindak pidana ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Adapun tindak pidana commisionis per ommisionis commisa adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang, tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat.<sup>9</sup>

#### 4. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

Pembatasan pengertian tindak pidana dolus ialah tindak pidana yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan. Sedangkan tindak pidana culpa ialah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau menurut lamintang adalah tindak pidana yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunnya dapat dihukum.<sup>10</sup>

#### 5. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau tindak pidana yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satukali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku

---

<sup>9</sup>Ibid, hal 28

<sup>10</sup>Ibid, hal 29

tersebut telah berulang kali melakukan tindakan ( yang sama ) yang dilarang oleh undang-undang.<sup>11</sup>

#### 1.5.1.4 Kemampuan bertanggung jawab

Masalah kemampuan bertanggung jawab adalah berkenaan dengan keadaan jiwa atau batin si pelaku pada waktu melakukan tindak pidana. Bagaimana soal undang-undang mengenai kemampuan bertanggung jawab. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan dari dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab tampaknya diletakkan pada unsur subjektif pembuat tindak pidana bukan pada unsur objektifnya. Unsur subjektif pembuat tindak pidana merupakan unsur yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak. Perbedaan antara unsur objektif dan unsur subjektif sangat penting oleh karena masalah kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana dikaitkan dengan sikap batin pembuat tindak pidana, bukan pada perbuatan atau *actus reus* semata.

---

<sup>11</sup>Ibid, hal 29



#### 1.5.1.5 Tidak Adanya Alasan Dasar Pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan pula tidak adanya dasar pemaaf. Menurut MoelJatno alasan pemaaf adalah “alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan”.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diketahui bahwa baru dapat dipidana apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana konsep tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana.

#### 1.5.1.6 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana . kata pidana berarti hal yang dipindahkan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dngan suatu keadaan , yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.

Akan tetapi hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana sebab ada istilah hukum pidana disamping hukum perdata seperti misalnya ganti-rugi berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan.<sup>12</sup>

Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengeni pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipindahkan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>13</sup>

#### 1.5.1.7 Tujuan Pidana

Dalam literatur berbahasa inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D ialah Reformation, Restraint, dan Retribution sedangkan D ialah Deterrence yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence ( pencegahan khusus dan pencegahan umum ) Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari msyarakat. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. 2003. hal 1

<sup>13</sup> Gunadi, Isnu dkk. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Prestasi Pustaka Publisher. 2011. hal 2

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal 28

#### 1.5.1.8 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Militer

Pengertian pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu/idiot*), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam.

2. Dengan perkataan lain bahwa subjek dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya : dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Pengertian pertanggungjawaban militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi bisa disimpulkan dengan mengkaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa

pertanggung jawaban militer adalah kemampuan bertanggung jawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (pemasyarakat militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.

Hal seperti itu perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka hakekat pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHAP. Secara umum tanggungjawab baru akan timbul apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau badan. Sama halnya dengan aturan hukum pidana, seseorang baru akan dituntut pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan atau perbuatan yang ditimbulkan. Lebih lanjut dalam

menjelaskan kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat.

Setiap militer yang melakukan tindak pidana militer murni khususnya desersi dianggap mampu bertanggungjawab apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim tidak menghadirkan saksi ahli untuk tindak pidana desersi kecuali tindak pidana militer campuran seperti pembunuhan. Anggota militer dalam tindak pidana desersi dapat dipidana jika perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana desersi dan telah terbukti bersalah, dimana anggota militer tersebut yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari dan dalam waktu perang lebih dari empat hari.

Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang militer. Hukum menganggap militer tersebut memang jelas mampu bertanggungjawab karena keadaan batin seorang militer saat melakukan perbuatan pidana dianggap dalam keadaan sehat dan normal. Oleh Majelis Hakim tentang adanya kemampuan bertanggung jawab militer dalam tindak pidana desersi menimbang bahwa anggota militer mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidana, oleh karena militer yang bersalah maka ia harus dihukum.

#### 1.5.1.9 Dasar Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Militer

Pengertian Hukum Disiplin Militer adalah serangkaian peraturan yang berisi norma-norma untuk mengatur, menegakkan dan membina disiplin militer atau tata kehidupan militer, agar segala tugas dan kewajiban dapat berjalan dengan sempurna<sup>15</sup>.

Ada dua jenis pelanggaran disiplin militer yang ditentukan dalam KUHDH yaitu :

##### 1. Pelanggaran disiplin yang murni

Adalah seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 nomor 1 KUHIM. Perumusan ini luas sekali yaitu meliputi setiap perbuatan yang mengakibatkan terlanggarnya kepentingan yang khusus yaitu kepentingan golongan semata-mata berupa kepentingan militer, di mana tidak menyangkut kepentingan umum yang lebih luas

##### 2. Pelanggaran disiplin yang tidak murni

Pelanggaran ini sebenarnya adalah merupakan tindak pidana (umum/militer) tertentu seperti yang di rumuskan dalam KUHP/KUHPM ataupun dalam peraturan perundangan pidana lainnya, yang meringankan atau yang sedemikian ringan sifatnya.

Sedangkan tindak pidana yang dapat ditangani dan diselesaikan secara disipliner adalah beberapa kejahatan tertentu dalam KUHP serta beberapa tindak pidana tertentu dalam KUHP dan peraturan

---

<sup>15</sup> A. Sardjono, Jacob L Sumuk, a Hasyim, Diklat Hukum Militer Untuk Lanjutan Perwira, TNIAD,1981,hal 3

perundangan lainnya sebagaimana yang ditunjuk oleh pasal 2 nomor 2 sampai dengan 6 KUHDM.

Dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana militer. Pertanggungjawaban pidana militer bentuknya adalah dengan menerima segala pemidanaan yang telah diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM dan Pasal 8 Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk seluruh militer/TNI baik mengenai norma-normanya maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga

perkaranya dapat diselesaikan di luar Pengadilan, misalnya: datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi. Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan diatas dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI berupa :

- a. teguran
- b. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
- c. penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

#### 1. Pidana Pokok :

##### a. Pidana Mati

Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-PTM Jakarta, 1981, hal 35



b. Pidana Penjara.

Ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

c. Pidana Kurungan,.

Ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.

d. Pidana Tutupan

adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk mengimbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan.

2. Pidana Tambahan :

a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1981, hal 36

Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM yang bunyinya:

- (1) Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pension hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu<sup>18</sup>.

#### b. Penurunan pangkat

Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-perwira

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 37

c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP. Ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP. Ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer. Ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum yang ada. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih<sup>19</sup>.

## 1.5.2 Pengertian anggota militer yang menghilangkan senjata api

### 1.5.2.1 Perlengkapan perang

Setiap Militer ditanamkan pengertian bahwa senjata atau perlengkapan militer adalah jiwanya<sup>20</sup>. Jadi perlengkapan itu tidak boleh terpisah dari seorang militer. Apabila seorang militer tanpa mempunyai perlengkapan karena ditinggalkan di medan pertempuran,

---

<sup>19</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-PTM Jakarta, 1981, hal 40

<sup>20</sup> Moch.Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 205

dengan apa ia akan menghadapi musuh yang datang menyerang. Bahkan senjata dan perlengkapan perang itu adalah istri kedua bagi seorang militer. Jadi meninggalkan senjata, mesiu dan perlengkapan perang lainnya sangat dilarang atau tidak boleh terjadi bagi seorang militer karena hal itu dapat digunakan musuh.

Senjata yang dimaksudkan di dalam militer merupakan kelengkapan alat yang digunakan pada saat berperang maupun pada saat tidak di siagakan dalam waktu berperang, sedangkan yang dimaksud dengan peralatan dalam berperang ialah suatu alat atau kelengkapan bagi seorang militer baik digunakan dalam keadaan damai maupun saat berperan, yang dimaksud dengan perlengkapan perang ialah alat alat kelengkapan untuk perang yang biasanya dipakai atau dibawa perseorangan diluar senjata, seperti teropong, peta, ransel, dan sebagainya. Yang dimaksud dalam keperluan peralatan dalam berperang menurut pasal 147 sampai dengan 149 ada tiga jenis yaitu :

- a) Binatang yang digunakan dalam keperluan angkatan perang
- b) Barang keperluan berperang (senjata ,amunisi ,dan bahan makanan)
- c) Barang yang termasuk pakaian militer

Tiada berlebihan jika dikatakan bahwa makna yang terkandung agar setiap saat terjamin penggunaan dari barang tersebut, baik untuk keperluan angkatan perang (satuan atau perseorangan) maupun untuk keperluan perangnya sendiri.

Di dalam pasal 147 sampai dengan pasal 149 dijelaskan di dalam masing masing pasal yang berbunyi :

Pasal 147 : Barang siapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja membunuh, membinasakan, membuat tidak terpakai untuk dinas atau menghilangkan binatang keperluan angkatan perang diancam :

1. Dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan tersebut dilakukannya, sementara ia termasuk suatu angkatan perang yang disiapsiagakan
2. Dengan pidana penjara maksimum lima tahun dalam hal lain lainnya

Pasal 148 : Barang siapa, yang dengan sengaja melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang, atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya diancam :

1. Dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun ,apabila tindakan itu dilakukan sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang.
2. Dengan pidana penjara maksimum lima tahun, di luar hal hal yang disebutkan pada sub-1 pasal ini

Pasal 149 : Militer, yang termasuk pada suatu angkatan perang yang di siap siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjamkan ataupun meghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang di ketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun .

#### 1.5.2.2 Dengan Sengaja Dan Semaunya

Dalam hal ini ada dua golongan perbuatan materiil yang masing masing ditujukan kepada satu golongan objek. Pada golongan perbuatan materiil yang pertama ditentukan secara tegas adanya unsur : dengan melawan hukum dan dengan sengaja, sedangkan untuk golongan

perbuatan materiil yang kedua tidak ditentukan adanya unsur “dengan melawan hukum”. Uraian untuk golongan pertama “dengan sengaja”. Walaupun untuk golongan kedua tidak secara tegas unsur bersifat melawan hukum dirumuskan, namun dari perumusan dengan semanya, berarti bahwa petindak telah melakukan perbuatan itu tidak dengan seizing atasannya yang berwenang, dan tidak karena terpaksa.<sup>21</sup>

#### 1.5.2.3 Perbuatan menghilangkan atau merusak senjata dalam perang maupun di luar perang

Perbuatan perbuatan merusak, membinasakan, dan membuat tidak terpakai adalah perbuatan perbuatan yang bertingkat dimulai dari yang terberat atau tertinggi. Menghilangkan berarti bahwa ketika barang itu dibutuhkan sudah tidak dapat diketemukan lagi, tidak menjadi soal barang tersebut dalam keadaan baik maupun rusak<sup>22</sup>.

Yang dimaksud dengan perbuatan menanggalkan dari diri sendiri adalah melepaskan dari diri sendiri sesuatu barang yang menurut ketentuan bagi seseorang militer dalam suatu gerakan (latihan) wajib dibawa sendiri, sehingga ia tidak dapat menggunakannya atau ia tidak mau menggunakannya lagi<sup>23</sup>.

Dalam suatu latihan berat atau pemindahan pasukan, terutama apabila seseorang militer sudah sangat kecapekan, penanggalan barang

---

<sup>21</sup>E Y Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981 hal 414

<sup>22</sup> Ibid 415

<sup>23</sup> Ibid 415

barang tersebut terutama bahan makanan atau perlengkapan perang (senjata) sering terjadi.

Jika perbuatan tersebut (merusak dan sebagainya, menanggalkan) terjadi dalam suatu pertempuran dengan musuh, maka pasal 75 yang lebih tepat diterapkan, yang berbunyi militer yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh dengan mengabaikan kewajibannya sebagai militer melarikan diri atau menghancurkan, membuat tidak dapat terpakai atau merusak suatu peralatan perang, ataupun menanggalkan sesuatu senjata, amunisi atau menurut aturan termasuk persenjataan atau perlengkapannya, ataupun membiarkan diri sendiri ditawan, maka akan diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.”. Apabila petindak ketika melakukan perbuatan itu termasuk suatu angkatan perang yang disiapsiagakan, ancaman pidananya lebih berat.

#### 1.5.2.4 Dasar Hukum Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Yang Merupakan Peralatan Dalam Berperang

Dasar Hukum tersebut ada didalam KUHPM di dalam pasal 148 yang berbunyi :

Barang siapa, yang dengan sengaja melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang, atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya diancam :

1. Dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukan sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang.

2. Dengan pidana penjara maksimum lima tahun, di luar hal hal yang disebutkan pada sub-1 pasal ini.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor.8.tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api pada pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara<sup>25</sup>.

Menurut ketentuan yang berlaku cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologi tertentu
2. Pemohon harus orang yang tidak cepat gugup, panic, emosional, dan cepat marah. Harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan tim yang ditunjuk dinas psikologo Mabes Polri
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan
4. Pemohon harus berusia 21 tahun sampai 65 tahun

Selanjutnya pemohon juga harus mengetahui prosedur yang ditetapkan dan yang diarahkan, meliputi :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Polda setempat
2. Setelah itu pemohon harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, keahlian. Untuk mendapatkan sertifikat, harus lulus tes keahlian.
3. Proses berjalan selama 3-6 bulan, apabila pemohon gagal dalam menjalankan semua persyaratan dan tes yang dijalankan maka Polri menolak untuk melanjutkan uji kepemilikan.

Syarat izin kepemilikan senjata api TNI/POLRI adalah sebagai berikut ;

1. Surat permohonan, yang ditujukan kepada :
  - a) Kapolri
  - b) Kapolda setempat

---

<sup>24</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1981,hal 414.

<sup>25</sup> Undang-Undang Senjata Api Nomor 8 Tahun 1948



2. Foto copy KTP
3. Foto copy kartu keluarga
4. Surat keterangan jabatan
5. Rekomendasi polresta/polrestabes
6. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
7. Surat keterangan Psikologi (lulus)
8. Surat keterangan menembak (lulus)
9. Surat keterangan kesehatan (lulus)
10. Daftar riwayat hidup
11. Pas photo berwarna latar belakang merah, ukuran 2x3 dan 4x6 = 6 lembar

Setiap militer ditanamkan pengertian bahwa senjata atau perlengkapan militer itu adalah jiwanya. Jadi perlengkapan-perengkapan itu tidak boleh terpisah dari seorang militer. Apabiala seorang militer tanpa mempunyai perlengkapan karena ditinggalkan di medan pertempuran, dengan apa ia akan menghadapi musuh yang datang menyerang. Bahkan senjata dan perlengkapan perang itu adalah istri kedua bagi seorang militer<sup>26</sup>. Itulah yang menjadi dasar kenapa setiap anggota militer wajib mempunyai senjata, TNI bukanlah semata-mata mengharapkan gaji, melainkan prajurit pejuang<sup>27</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen

---

<sup>26</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006,

<sup>27</sup> A. Sardjono dkk, *Diklat Hukum Militer Untuk Kursus Lamjutan Perwira*, S.R Sianturi, 1981, hal 57

disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>28</sup>

#### 1.6.2 Sumber Data

Sumber bahan hukum dan atau data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder

##### 1. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, questioner, dan lain-lain.

##### 2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

#### 1.6.3 Metode pengumpulan data dan pengolahan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara:

- a. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan ditempat objek yang akan penulis teliti.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, S.H., Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 13-14

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

c. Interview (wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berwenang dibidangnya, untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan wawancara kepada hakim.

#### 1.6.4 Metode analisis data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis dan tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber yang ada.<sup>29</sup>

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dimana dalam menganalisis/ pengolahan

---

<sup>29</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 66

data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi kepustakaan ataupun melalui cyber media.

Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan sesuai yang telah dilihat, didengar dan dimengerti, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah tersebut.

#### 1.6.5 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, alasannya karena lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis, dengan mengambil putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terkait dengan permasalahan dalam laporan hasil penelitian skripsi.

#### 1.6.6 Sistematika penulisan

Penulis membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan ini dibagi empat bab pembahasan, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini penulis membagi kedalam enam sub bab pembahasan sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub-sub ke dua adalah rumusan masalah yang berisi poin-poin perumusan masalah dari uraian

latar belakang, sub bab ke tiga adalah tujuan penelitian yang berisi poin tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, sub bab ke enam adalah metode penelitian.

BAB II : Merupakan jawaban dalam permasalahan yang pertama. Penulis akan membahas tentang Faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota militer kehilangan senjata api.

BAB III : Membahas tentang permasalahan kedua yaitu mengenai pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang meghilangkan senjata api . Dari bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pertama mengenai anggota militer yang menghilangkan senjata api.sub bab Kedua. Perbuatan menghilangkan atau merusak senjata dalam perang maupun di luar perang . sub bab Ketiga mengenai dasar hukum anggota militer yang menghilangkan senjata yang merupakan peralatan dalam berperang

BAB IV : Penutup, merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.6.7 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan dimulai bulan Januari sampai Juni. Dimana pada bulan Januari penulis melakukan penelitian, dan pada bulan Januari pertengahan penulis mengamatai proses

persidangan dilokasi penelitian sehingga telah memiliki sebagian data dan gambaran mengenai masalah penelitian yang dibahas, dimana pada minggu terakhir bulan Maret dilakukan pencarian data kepustakaan yang kemudian diklasifikasi, untuk digunakan sebagai kajian pustaka dalam bab1.

Disisi lain, penulis juga melakukan penelitian dengan cara wawancara pada pihak – pihak yang terkait untuk melengkapi data-data dan informasi yang telah diperoleh. Dan penulis dapat melihat secara langsung praktek dilapangan. Kemudian data-data tersebut dikaji secara sistematis kedalam penulisan pada bab 2, bab 3, dan bab 4 yang dilakukan pada akhir bulan April dan 2 minggu pertama bulan April. Tahap penyelesaian penulisan dilakukan pada awal minggu ketiga pada bulan Mei.